

## **Pengaruh *Good Public Governance* dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan di Pemerintahan Kota Ambon**

Retno Widia Astuti

*Fakultas Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Pattimura*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good public governance* dan pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah kota ambon. Melihat sejauh mana laporan keuangan menyajikan informasi yang benar dan jujur, yang dapat dirasakan oleh berbagai kepentingan untuk terciptanya keadilan di dalam sistem dan saling berinteraksi satu sama lain agar tercapainya suatu target atau sasaran yang telah ditetapkan di dalam pengendalian internal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis aktual, laporan keuangan pemerintah harus memenuhi 4 karakteristik kualitatif/kualitas informasi berikut: relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami.

Populasi pada penelitian ini adalah kepala dinas atau sekretaris dinas, kepala subbagian keuangan dan perencanaan, kepala bagian, dan staf yang bekerja lebih dari setahun di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ambon. Teknik pengambilan sampel Penelitian ini dilakukan pada 24 Organisasi Perangkat Daerah, terdiri dari Dinas dan Badan di Pemerintahan Kota Ambon, dengan teknik pengambilan sampel secara purposive sampling menghasilkan 96 sampel untuk diolah. Teknik pengumpulan data melalui penelitian lapang berupa menyebarkan kuisioner kepada responden, Data yang diperoleh dianalisis menggunakan program SPSS versi 24 dengan metode analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *good public governance* dan pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Dibuktikan dengan nilai uji t menunjukkan angka -2,958 dan signifikasinya  $0,004 < 0,05$  dari hasil tersebut maka ada pengaruh yang signifikan antara *good public governance* dan kualitas informasi laporan keuangan. Sedangkan uji t untuk variabel pengendalian internal menunjukkan angka 6,805 dan signifikansinya  $0,000 < 0,05$  dari hasil tersebut maka ada pengaruh yang signifikan antara pengendalian internal dan kualitas informasi laporan keuangan. Hasil analisis koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan besarnya pengaruh *good public governance* dan pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan yaitu 0,325 artinya 32,5% dan sisanya 67,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** *good public governance*, pengendalian internal, kualitas informasi laporan keuangan.

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of good public governance and internal control on the quality of information on the financial statements of the Ambon city government. Seeing the extent to which the financial statements provide true and honest information, which can be felt by various interests for the creation of justice in the system and interact with each other in order to achieve a target or objectives that have been set in internal control. Based on Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Actual-based Government Accounting Standards, government financial reports must meet the following 4 qualitative / quality information characteristics: relevant, reliable, comparable, understandable.*

*The population in this study were the heads of offices or service secretaries, heads of finance and planning subsections, heads of sections, and staff who worked for more than a year in the Ambon City Government Regional Apparatus Organization. Sampling technique This research was conducted at 24 Regional Apparatus Organizations, consisting of Agencies and Agencies in Ambon City Government, with the sampling technique using purposive sampling to produce 96 samples to be processed. Data collection techniques through field research in the form of distributing questionnaires to respondents. The data obtained were analyzed using SPSS version 24 with the data analysis method using multiple linear regression analysis techniques. The results showed that good public governance and internal control had an effect on the quality of information on local government financial reports. Evidenced by the t-test value shows the number -2,958 and the significance is 0.004 <0.05, so there is a significant influence between good public governance and the quality of financial statement information. While the t test for the internal control variable shows the number 6.805 and the significance is 0.000 <0.05, so there is a significant influence between internal control and the quality of financial statement information. The results of the analysis of the coefficient of determination (R<sup>2</sup>) show the magnitude of the influence of good public governance and internal control on the quality of financial statement information, namely 0.325, which means 32.5% and the remaining 67.5% is influenced by other variables not discussed in this study.*

**Keywords:** *good public governance, internal control, quality of financial report information.*

## 1. PENDAHULUAN

Tata pemerintahan yang baik (*good public governance*) merupakan harapan dari setiap warga negara dalam sebuah pemerintahan. Pemerintah daerah bekerja sesuai dengan aturan perundang-undangan, dalam menjalankan setiap pekerjaannya dengan tujuan kesejahteraan rakyat bersama pada daerah tempat para pegawai bekerja (I Wayan; 2018).

Konsep *good public governance* ini muncul karena kurang efektifnya kinerja pemerintah yang selama ini dipercaya sebagai penyelenggara urusan publik. Pemerintahan yang

berkualitas akan mewujudkan suatu kehidupan negara yang teratur dan akan mewujudkan *good public goverance* yang diharapkan. Setiap masyarakat memiliki pola pemikiran yang berbeda mengenai sebuah pemeritahan yang disebut *good public governance*. Kehidupan masyarakat yang makmur bisa menjadi tolak ukur apakah sistem pemerintahan daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah sudah terlaksana dengan baik atau belum (I Wayan;2018).

Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting agar tujuan pemerintah daerah dapat tercapai, tanpa adanya pengendalian

internal tujuan pemerintah tidak akan tercapai secara efektif dan efisien. Maka dari itu pengendalian internal juga berperan penting dalam membuat kualitas informasi laporan keuangan yang baik dan dapat diandalkan. Pemahaman yang sama tentang efektivitas pengendalian internal merupakan suatu hal yang sangat penting. Mengingat kompleksnya permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan *good public governance* pada kualitas informasi laporan keuangan daerah (Pratiwi, 2014;12).

Laporan keuangan yang berkualitas merupakan laporan yang dapat menyajikan informasi yang benar, jujur, relevan, andal, dapat diperbandingkan, dan dapat dipahami. Laporan keuangan yang berkualitas penting karena akan dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (*Governmental Accounting Standards Board – GASB, Concepts Statement No.1, 1999*). Selain itu informasi laporan keuangan yang berkualitas akan mengikis kurang percaya masyarakat terhadap pemerintah daerah dengan adanya berbagai skandal keuangan (Haliah;2013)

Informasi laporan keuangan yang tidak berkualitas (buruk) memberikan peluang bagi adanya penyimpangan dan kekeliruan di bidang keuangan. Hal tersebut akan menimbulkan kecurangan, korupsi, kolusi yang bisa menimbulkan tuntutan hukum. Jika berlangsung terus menerus tentu saja rakyat akan menanggung akibatnya, biaya transaksi yang tinggi dan pelayanan kepada publik yang buruk. Selanjutnya, berakibat pada terjadinya krisis kepercayaan baik masyarakat, kreditur, dan investor internasional akan ragu menempatkan dananya di Indonesia, kecuali dengan beban (*cost of money*) yang tinggi. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah memperhatikan dan meningkatkan kualitas dari informasi laporan keuangan. Namun

kenyataannya, fenomena yang terjadi tidak sesuai dengan harapan tersebut. Hal ini berarti berbeda antara fenomena lapangan (kenyataan) dengan teori (harapan) (Haliah;2013).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada ketidakpatuhan dalam pengelolaan finansial negara, BPK juga mencatat masih banyak kementerian negara atau lembaga (k/l) yang laporan keuangannya tidak memiliki opini (TMP) (Moermahadi Soerja; didownload dari [www.tribunnews.com/nasional](http://www.tribunnews.com/nasional)).

Opini BPK atas laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, (Sri Mulyani, 2019; didownload dari [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)).

Di Indonesia yang belum capai WTP hanya Provinsi NTT dan Maluku. Hal itu karena sumber daya manusia belum memadai dan sistem pengendalian internalnya masih harus terus diperbaiki, sehingga saya akan sampaikan langsung saran-saran kepada Gubernur NTT dan Maluku,” kata Harry di Kupang, seperti ditulis Kompas.com, Jumat, (12/2/16).

Ambon mendapatkan Opini WTP karena dalam LKPD Kota Ambon Tahun 2017 mampu menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, namun dari laporan hasil pemeriksaan tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Kota Ambon untuk melengkapi laporan keuangan tersebut dengan waktu yang ditentukan selambat-lambatnya 60 hari setelah hasil pemeriksaan diterima,” tutur Muhammad Abidin Kepala BPK Perwakilan Maluku.

Ambon kembali mendapat WTP pada tahun 2018 namun masih banyak yang harus dibenahi karena BPK masih mendapat temuan-temuan

yang harus diperhatikan meski pemerintah kota ambon melaksanakan mencapai 70% karena target maksimal pemerintah kota ambon harus mencapai 90%,” kata Walikota Ambon, Richard Louhenapessy.

## **2. TELAHAH LITERATUR DAN PERUMUSAN**

### **2.1. Kajian Dan Teori Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)**

Kualitas didefinisikan suatu kondisi dinamis dimana yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan (Tjiptono, 2004:51).

Selanjutnya kualitas didefinisikan sebagai “kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan (Mulyana, 2010:94).

IAI (2009:1) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pengertian laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atau dibuat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan tersebut didalamnya mencakup semua posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dibuat oleh suatu entitas akuntansi. Entitas Akuntansi dilingkup pemerintah pusat yaitu setiap kuasa pengguna anggaran di lingkungan suatu kementerian Negara/Lembaga. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi, karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut IAI (2009 : 1) yaitu : Dapat Dipahami, Relevan, Keandalan dan Dapat dibandingkan.

### **2.2. Kajian Dan Teori Terhadap Good Publik Governance (X1)**

Konsep *good governance* dari segi fungsional aspek *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan, atau justru sebaliknya dimana pemerintahan tidak berfungsi (Sedarmayanti, 2012:4).

Hal yang paling mendasar untuk melaksanakan prinsip menciptakan keadilan dibutuhkan beberapa prasyarat yang saling terkaitan dan satu sama lainnya saling mempengaruhi adalah: 1. Transparansi; 2. Akuntabilitas; 3. Kepastian hukum; 4. Partisipasi.

Empat syarat tersebut akan berdampak pada dampak selanjutnya terhadap *public governance* yang akan dirasakan *stakeholders* yang berbagai kepentingan, adalah terciptanya keadilan (*fairness*) dalam supra system, untuk saling berinteraksi satu sama lain (Adrian Sutedi, 2012:44).

### **2.3. Kajian Dan Teori Terhadap Pengendalian Internal (X2)**

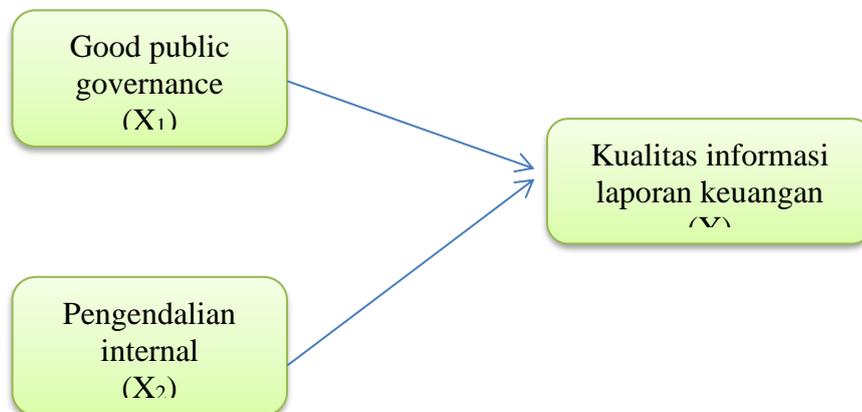
Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan direksi, manajemen dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut ini: (1) keandalan pelaporan keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3) efektifitas dan efisiensi operasi (Boynton,2006:391, dalam Riris Dwi 2015).

Sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan eksekutif (kepala daerah, instansi/dinas, dan segenap personel) yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan yang terdiri atas : (1). Keandalan laporan keuangan, (2). Kepatuhan terhadap

hukum dan peraturan yang berlaku, (3). Efektifitas dan efisiensi operasi (Indra bastian, 2007:7). Selain itu, sistem pengendalian internal harus terintegrasi dengan baik supaya dapat dipercaya tingkat keandalan datanya. Faktor ketepatan waktu dalam memposting data maupun otorisasi dokumen transaksi harus diperhatikan sehingga sistem yang berjalan tidak mengalami kebocoran. Untuk memastikan sistem tersebut berjalan

dengan baik, maka dilakukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada aparatur yang berkompeten.

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu telah dijelaskan beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya pengaruh kualitas informasi laporan keuangan. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:



Berdasarkan permasalahan penelitian, tujuan penelitian dan kajian teoritis yang ada, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: “*Good public governance* berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan”.

H<sub>2</sub>: “Pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan”.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada dinas dan badan pada pemerintah kota ambon. Ada 24 dinas pemerintahan yang akan diteliti.

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah responden bagian keuangan pada setiap dinas di bagian keuangan, sampel diambil sesuai kriteria teknik sampling yaitu setiap dinas 4 responden.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen bertujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2011 dalam Harlinda, 2016). Pengujian dengan regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh *good public governance* dan pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hubungan antar variabel-variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam persamaan sebagai berikut:  $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \epsilon$  dimana Y adalah Kualitas Informasi Laporan Keuangan, a adalah Nilai Konstanta, X<sub>1</sub> adalah *Good public*

*governance*,  $X_2$  adalah Pengendalian internal,  $b_1$ ,  $b_2$  adalah Koefisien regresi dari masing-masing variabel  $\epsilon$  (eror) adalah Faktor lain yang tidak diteliti.

Uji parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5%, dengan derajat kebebasan  $df=(n-k-1)$ , dimana  $n$  adalah jumlah responden dan  $k$  adalah jumlah variabel bebas (Sunyoto, 2011a : 13).

diteliti.

Uji Reliabilitas Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Azwar (1997), reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda apabila dilakukan kembali kepada subyek yang sama. Nunnally (1960) dalam Ghozali (2006) mengatakan pada umumnya suatu konstruk atau variabel

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 .

Untuk melihat apakah instrument tersebut valid, maka dilakukan uji validitas dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing butir pertanyaan terhadap total skor. Bila korelasi antara masing-masing butir terhadap total skor tersebut signifikan maka data tersebut dinyatakan valid.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji validitas menguji masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, dimana keseluruhan variabel penelitian adalah 26 pernyataan yang harus dijawab oleh responden, yaitu 11 pernyataan untuk  $X_1$ , 4 pernyataan juga untuk  $X_2$  dan 11 pernyataan untuk  $Y$ . Berikut Tabel 4.3 data validitas :

**Tabel 4.1 Validasi data**

Variabel / Indikator	Korelasi r	Indikator tabel Korelasi	R Tabel	Keterangan
<i>Good Public Governance (X<sub>1</sub>)</i>				
	0,608		0,201	Valid
	0,591		0,201	Valid
	0,646		0,201	Valid
	0,617		0,201	Valid
	0,603		0,201	Valid
	0,693		0,201	Valid
	0,602		0,201	Valid
	0,488		0,201	Valid
	0,617		0,201	Valid
	0,722		0,201	Valid
	0,681		0,201	Valid
<i>Pengendalian Internal (X<sub>2</sub>)</i>				
	0,850		0,201	Valid
	0,859		0,201	Valid
	0,845		0,201	Valid
	0,846		0,201	Valid
<i>Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Y)</i>				
	0,544		0,201	Valid
	0,695		0,201	Valid

Variabel / Indikator	r tabel	Korelasi	R Tabel	Keterangan
Korelasi		0,553	0,201	Valid
Keterangan		0,665	0,201	Valid
		0,599	0,201	Valid
		0,626	0,201	Valid
		0,660	0,201	Valid
		0,547	0,201	Valid
		0,601	0,201	Valid
		0,613	0,201	Valid
		0,625	0,201	Valid

Sumber : Data SPSS 24 (2020)

Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa semua indikator untuk variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub> dan Y yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini dinyatakan sebagai item yang valid. Hal ini karena indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini semua memiliki nilai korelasi yang lebih besar dari nilai r tabel 0,201.

Kuesioner dikatakan reliabel ketika responden konsisten menjawab setiap pertanyaan dari waktu ke waktu. Sebelum dilakukan pengolahan hasil data kuesioner, maka dilakukan uji kehandalan data supaya kesimpulan yang diperoleh handal. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini:

**Tabel 4.2 Uji Realibilitas**

Varibel	Nilai Alfa	Keterangan
<i>Good Public Governance</i>	0,841	Reliabel
Pengendalian Internal	0,871	Reliabel
Kualitas Informasi Laporan Keuangan	0,829	Reliabel

Sumber : Data SPSS 24 (2020)

Nilai *alpha* variabel *Good Public Governance* adalah 0,841 sehingga data *Good Public Governance* dikatakan reliabel, nilai *alpha* dari variabel Pengendalian Internal adalah 0,871, sehingga data Pengendalian Internal dikatakan reliabel dan nilai *alpha* variabel Kualitas Informasi Laporan Keuangan adalah 0,829 sehingga data Kualitas Informasi Laporan Keuangan

juga reliabel.

Uji t bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (*good public governance* dan pengendalian internal) dan variabel dependen (Kualitas informasi laporan keuangan). Hasil uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.7 dibawah ini:

**Tabel 4.3 Uji t Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Standardized Coefficients		Beta	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error			Tolerance	VIF
(Constant)		3.311		.000		
Good Public Governance	-.259	.008	-.305	.004	.661	.494
Pengendalian Internal	.211	.008	.701	.000	.661	.494

a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Sumber : Data SPSS 24 (2020)

Variabel *good public governance* memiliki  $t_{hitung}$  sebesar -2,958 dan nilai signifikansi sebesar 0,004 pada tingkat signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa  $0,004 < 0,05$  maka  $H_1$  yang berbunyi “*good public governance* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan di Pemerintahan Kota Ambon”. Selain itu hasil *good public governance* perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  yang menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar -2,958 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar (1,661), maka di katakan  $H_1$  diterima, artinya variabel independen (*good public governance*) berpengaruh terhadap variabel dependen kualitas informasi laporan keuangan dan signifikan.

Hal ini dikarenakan masih ada yang belum maksimal dalam menjalankan *good public governance*, terlihat dari segi kurangnya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu, dan dilihat juga dari pernyataan tentang meningkatkan dan melaksanakan ketaatan hukum, rata-rata dijawab oleh responden netral, artinya belum dilakukan

dengan baik bahkan ada yang tidak memberikan transparansi terhadap akses informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu untuk di ketahui masyarakat maupun dalam hal ketaatan hukum.

Variabel pengendalian internal memiliki  $t_{hitung}$  sebesar 6,805 dan nilai signifikansi sebesar 0,004 pada tingkat signifikansi 0,05. Dapat disimpulkan bahwa  $0,000 < 0,05$  maka  $H_2$  yang berbunyi “pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan di Pemerintahan Kota Ambon”. Perbandingan antara  $t_{hitung}$  dan  $t_{tabel}$  pengendalian internal yang menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,805 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,986 maka di katakan bahwa  $H_2$  diterima, artinya variabel independen (pengendalian internal) berpengaruh positif terhadap variabel dependen kualitas informasi laporan keuangan dan signifikan.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*Multiple regression analysis*). Hasil pengujian untuk hipotesis 1 dan 2 dapat terlihat pada Tabel 4.9 dibawah ini :

**Tabel 4.4 Coefficients regresi Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics
	B	Std. Error	Beta	T		
1 (Constant)	38.218	3.306		11.560	.000	
Good Public Governance	-.259	.088	-.305	-2.958	.004	.669
Pengendalian Internal	1.211	.178	.701	6.805	.000	.669

a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Sumber : Data SPSS 24 (2020).

Dalam persamaan  $Y = 38,218 - 0,259X_1 + 1,211X_2 + e$  menyatakan bahwa jika nilai *Good public governance* naik satu satuan, maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan naik sebesar -0,259 dan jika nilai Pengendalian internal naik satu satuan maka Kualitas Informasi Laporan Keuangan naik sebesar 1,211. Selain itu pada tabel *coefisients* diatas juga menunjukkan bahwa angka 0,669 pada *standardized coefficients* (Beta). Angka sebesar 0,669 atau 66,9% menunjukkan tingkat korelasi antara *Good public governance*, Pengendalian internal dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan yang kuat (hubungan dikatakan kuat karena mencapai 66,9% dan jauh diatas 50%).

Nilai t yang dijelaskan di atas adalah nilai yang dapat digunakan untuk pengujian, apakah pengaruh *Good public governance* dan Pengendalian internal terhadap jumlah Kualitas Informasi Laporan Keuangan benar-benar signifikan atau tidak. Nilai t pada variabel *Good public governance* menunjukkan angka -2,958 dan signifikasinya  $0,004 < 0,05$  dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa  $H_1$  diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan

antara *Good public governance* dan Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Bahwa semakin baik penerapan *good governance* maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan.

Nilai t pada variabel Pengendalian internal menunjukkan angka 6,805 dan signifikansinya  $0,000 < 0,05$  maka dapat diambil kesimpulan  $H_2$  diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara Pengendalian internal terhadap jumlah Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Hal ini memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari kualitas informasi laporan keuangan melalui sistem pengendalian internal, yang berarti semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah daerah maka kualitas informasi laporan keuangannya semakin baik.

Hasil regresi pada Tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa diperoleh nilai *Adjust R Square* sebesar 0,325 menunjukkan 32,5% variabel kualitas informasi laporan keuangan yang dapat dijelaskan oleh variabel *good public governance* dan pengendalian internal sedangkan sisanya sebesar 67,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam model

persamaan yang digunakan. Nilai statistik F sebesar 23,837 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian layak untuk digunakan. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah *good public governance* berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien  $b_1$  sebesar  $-0,259$  dengan nilai signifikansi  $0,004 < 0,05$  yang berarti bahwa berpengaruh negatif dan signifikan variabel *good public governance* terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada Tabel 4.9 bahwa nilai koefisien  $b_2$  sebesar 1,211 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil pengujian sejalan dengan hipotesis yang telah dibuat dimana terdapat pengaruh yang positif dan signifikan pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,805 sedangkan  $t_{tabel}$  sebesar 1,986.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan dan landasan teori diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian tesis ini antara lain :

1. *Good public governance* berpengaruh negative terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah/OPD pemerintah kota ambon. *good public governance* atau cara mengelola urusan-urusan publik

sejalan dengan aturan yang dilaksanakan secara adil dan melibatkan partisipasi dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk pembangunan daerah tetapi belum cukup baik melakukan transparansi dalam memberikan akses informasi yang siap tepat waktu, mudah dipahami, bebas diperoleh, terhadap akses informasi yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat.

2. Peningkatan pengendalian internal di setiap Organisasi Pemerintah Daerah/OPD, dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan karena pengendalian internal mengendalikan kinerja Organisasi Pemerintah Daerah/OPD, sehingga dapat mencegah kesalahan pegawai saat menjalankan tugas, pada akhirnya dapat melindungi aset pemerintah.

### 5.2 Saran

1. Organisasi Pemerintah Daerah/OPD dapat menyediakan layanan *customer service* berupa website agar masyarakat bisa menyalurkan kritik dan saran secara online sehingga pemerintah daerah dapat menerima langsung masukan masyarakat secara cepat dan masyarakat dapat mudah memberikan saran dimana dan kapan saja untuk pembangunan daerah.
2. Organisasi Pemerintah Daerah/OPD konsisten di dalam menerapkan SOP sesuai dengan fungsi dan tugas kinerja agar setiap fungsi dan kewenangan yang melekat pada jabatan tidak digunakan menyimpang dari SOP/ Standar Operasional Prosedur yang pada akhirnya memperkuat sistem pengendalian

- internal.
3. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melengkapi kekurangan dan melanjutkan variabel-variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini agar bisa menjadi suatu pembelajaran untuk kita semua dalam hal memajukan pemerintah kota ambon.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmito, Rahardjo, 2011. *“Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adrian, Sutedi. 2012. *“Good Corporate Governance”*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bastian, Indra. 2007. *“Audit Sektor Publik”*. Jakarta: Salemba Empat.
- Celviana Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten). (Purwokerto: SNA XIII).
- Darwanis, M, dan D. Dwi. 2009. Pengaruh Kapasitas Sumberdaya manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Universitas Syiah Kuala* Vol. 2. No. 2 Juli : 133151.
- Dita Arfianti. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Batang), Universitas Diponegoro, Semarang.
- Fikri, M. Ali, Inapty, B. Adha., Martiningsih, R. R. S. Pancawati. 2015. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD-SKPD Di Pemprov. NTB). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi* 18.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS* 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Governmental Accounting Standards Boards (GASB). 1999. Concepts Statement No. 1: Objectives Of Financial Reporting In Governmental Accounting Standards Boards Series Statement No. 34: Basic Financial Statement And Management Discussion And Analysis For State And Local Government. Norwalk.
- Harlinda, 2016, Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau), *Jurnal Sorot* Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau.
- Harnovinsah, *Metodologi Penelitian*. Pusat Bahan Ajar dan Elearning. Universitas Mercu Buana.
- Hidayat. 1986. *Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- <https://kumparan.com/ambonnesia/bpk-laporan-keuangan-kota-ambon-raih-wtp->

- [27431110790549262  
https://www.malukuprov.go.id/index.php/2016-10-06-01-22-07/dinas?start=12](https://www.malukuprov.go.id/index.php/2016-10-06-01-22-07/dinas?start=12)
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/04/bpk-temukan-1137-ketidakpatuhan-dalam-laporan-keuangan-pemerintah>
- <https://terasmaluku.com/pemkot-ambon-kembali-raih-wtp-atas-laporan-keuangan/>
- <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/05/04/p879mh335-iai-nilai-kualitas-pelaporan-keuangan-pemerintah-rendah>
- <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/05/04/p879mh335-iai-nilai-kualitas-pelaporan-keuangan-pemerintah-rendah>
- [https://www.researchgate.net/publication/326161268\\_Kualitas\\_Infomasi\\_Laporan\\_Keuangan\\_Pemerintah\\_Daerah\\_Dan\\_Faktor\\_Yang\\_Memengaruhinya\\_The\\_Quality\\_of\\_Information\\_in\\_Local\\_Government\\_Financial\\_Statement\\_and\\_the\\_Influential\\_Factors](https://www.researchgate.net/publication/326161268_Kualitas_Infomasi_Laporan_Keuangan_Pemerintah_Daerah_Dan_Faktor_Yang_Memengaruhinya_The_Quality_of_Information_in_Local_Government_Financial_Statement_and_the_Influential_Factors)
- Husaini Usman, dan Purnomo Setiady Akbar, 1996, , *Metodologi penelitian sosial*, PT. Bumi Aksara Jakarta. Cetakan 1.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Laporan Keuangan Daerah, Mengapa Mutu Laporan Keuangan Daerah menurun? Pemerintah Daerah Belum Paham Akuntansi ? Penerapan SAP Baru Kulit Luarnya.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 1994. *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- I Wayan Hari Kurniawan. 2018. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyusunan Rpjmd Di Bappeda Provinsi Lampung (Studi Dalam Tahap Musrenbang Dan Penetapan Rpjmd 2015-2019 Provinsi Lampung).
- I Putu Upabayu Rama Mahaputra dan I Wayan Putra. 2014. ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah,’ *jurnal akuntansi Universitas Udayana* 8.2.
- Mardiasmo, 2002. “*Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. (JAAI Volume 6 No. 1).
- Marsdenia, 2016.” Kualitas Informasi Laporan Keuangan Entitas Sektor Publik Daerah X”, *Jurnal Of Vocational Program University Indonesia*, Volume 4. Nomor 1. Januari – Juni 2016.
- Masdupi, 2005. ”Analisis Dampak Struktur Kepemilikan Pada Kebijakan Hutang Dalam Mengontrol Konflik Keagenan.” *Jurnal Ekonomi Bisnis* vol.20, No.1. Desember .
- Moh., Nazir, 2009. *Metode Penelitian*, (Cet.VII; Jakarta: Graha Indonesia).
- Nur Fitri Dewia, Ferdous Azama and Siti Khalidah Mohd Yusoff, 2019, Factors Influencing The Information Quality Of Local Government Financial Statement And Financial Accountability, *Journal Management Science Letter*, 1373–1384.
- Payanta, 2006 :Pengaruh Kualitas Auditor, Independensi, Dan Opini Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” , *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* Vol 6 No 1.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Riris Dwi Wahyu Rahmawati, 2015 : Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas pada PT.



- Graha Sarana Gresik.
- Sahya Anggra. 2012. *Ilmu Administrasi Negara Kajian Konsep, Teori Dan Fakta Dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Penerbit: Bandung;Pustaka Setia Cetakan 1.
- Sanusi, A. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance Pemerintahan Yang Baik Bagian Pertama* edisi revisi , Mandar Maju, Bandung.
- Sedarmayanti, 2012. *Good Governance Pemerintahan Yang Baik Bagian Kedua* edisi revisi , Mandar Maju, Bandung
- Sunyoto, Danang. 2011. *Analisis Regresi dan Uji Hipotesis*. Yogyakarta: CAPS.
- Tantriani Sukmaninggrum, 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*.
- Tohardi, 2008. *Petunjuk Praktis Penelitian Sosial*, Bandung: Mander Maju.